DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu.

Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, *XV*(1), 42–56.

Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & ... (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal:(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). *Owner: Riset Dan …*.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). *Analisis Flypaper EFFECT PAD Dan DAU Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014*, *3*, 103–111.

Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, *2*(2), 169–182. https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987

Bello, B. (n.d.). *EXPENDITURE AND INTERNALLY GENERATED REVENUE RELATIONSHIP : AN ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENTS IN ADAMAWA STATE , NIGERIA*. *3*(July 2015), 67–77.

Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *14*(1), 178. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598

Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks.

Farel, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(2), 189–210. https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2305

Farida. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa*. *8*(1), 634–645.

Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana ALokasi Khusus terhadap Belanja Moda Fungsi Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *3*(4), 585–599.

Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*.Universitas Diponegoro.

Hasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, *18*(1), 46–58.

Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4*(1), 1–18. https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10916

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

Mulyati, S., & Yusriadi. (2020). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *9*(2), 211–220. https://doi.org/10.22236/agregat

Olivia, G. (2019). Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. *Kontan*.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, Pub. L. No. Nomor 33/PB/2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pub. L. No. 71.

Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. *42*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 13, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 55 tahun 2005.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, Pub. L. No. No. 23 tahun 2014 pasal 309.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Andi.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2018b). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Terb). Andi.

Simamora, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap belanja daerah: dalam presfektif teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *14*(2), 258–271.

Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Susanti, S., Fahlevi, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *1*(1), 1.

Thamus, D. H. (2018). *The Analysis of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province*. 3526–3539.

UU Nomor 23 tahun 2014 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). (n.d.).

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, *2*(33), 44–51.

Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)*. *3*(2), 220–238.

Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(3), 2044-2070–2070.

Wulandari, Y. (2014). *Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia*.